

## BAB III

### ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

#### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam bidang penyelenggaraan penanganan urusan lingkungan hidup serta tugas lainnya yang diberikan Bupati.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan diatas, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai peran dan fungsi :

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup
- b. Penyelenggaraan penataan dan penaatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- c. Menyelenggarakan kebijakan teknis, pembinaan, fasilitasi dan pengawasan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun serta peningkatan kapasitas;
- d. menyelenggarakan kebijakan teknis, pembinaan dan pemantauan dalam hal pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati.

Pelaksanaan peran dan fungsi tersebut telah diupayakan secara optimal, namun upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Secara rinci identifikasi permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- Kualitas SDM Dinas Lingkungan Hidup belum optimal dan masih terbatasnya personil yang mengikuti diklat teknis lingkungan hidup.
- Belum adanya personil yang menduduki jabatan fungsional, baik sebagai PPLH, PPNS atau tenaga fungsional pengelola laboratorium.
- Penempatan SDM di masing-masing bidang dan seksi belum sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan keahlian.
- Disiplin dan tanggung jawab pegawai masih belum sesuai dengan aturan kepegawaian.
- Belum optimalnya mekanisme *reward and punishment* pada internal pegawai Dinas Lingkungan Hidup.

- Koordinasi antar Bidang dan Seksi serta dengan SKPD terkait lainnya belum berjalan secara optimal, antara lain dalam hal pengumpulan data, perencanaan, distribusi personil, penganggaran dan kerjasama dalam hal tupoksi.
- Belum lengkapnya data dasar tentang lingkungan hidup termasuk peta-peta berbasis *Geographical Information System (GIS)* seperti peta, peta potensi lahan kritis, peta mata air dan peta sumber pencemaran.
- Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi data.
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kajian lingkungan hidup.
- Pemeliharaan sarana dan prasarana belum optimal.
- Kurangnya sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan
- Belum lengkapnya Peraturan Daerah dan Petunjuk Pelaksanaan yang mengakomodasi permasalahan lingkungan hidup.
- Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
- Belum optimalnya keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan lembaga pendidikan dalam pengambilan keputusan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2016-2021 akan diprioritaskan kepada pembangunan yang berbasis perdesaan sesuai dengan karakteristik penduduk dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Permasalahan yang masih dihadapi Kabupaten Tasikmalaya antara lain kemiskinan, keterbatasan sarana dan prasarana infrastruktur dasar (jalan dan jembatan, listrik, air dan irigasi), keterbatasan untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Berdasarkan RPJPD, RPJMD tahun 2016-2021 merupakan tahap ke-3 yang diprioritaskan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas, yang ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan manusia (IPM), meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya proporsi penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk.

Berdasarkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, maka Visi Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016–2021 adalah:

**“KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN”**

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakulkarimah dan Berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata.
3. Mewujudkan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*).
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, misi yang berkaitan dengan Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup yaitu terdapat pada Misi ke-4 yaitu Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan. Adapun salah satu tujuan yang diemban pada misi keempat yaitu optimalisasi pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya produktivitas sumber daya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan.

Dalam rangka mencapai sasaran yang diinginkan, kebijakan yang dikeluarkan harus diupayakan dalam kaitan peningkatan kualitas lingkungan hidup dan pencegahan serta penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan serta peningkatan upaya penanggulangan bencana alam. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan misi keempat diantaranya meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian sasaran meningkatnya produktivitas sumber daya alam, terpeliharanya kualitas lingkungan serta pencegahan dan penanggulangan kerusakan/pencemaran lingkungan, disusun beberapa program terkait yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- b. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah
- d. Program Peningkatan Perencanaan dan penganggaran SKPD
- e. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- f. Program Perlindungan dan Konservasi SDA
- g. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- h. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- i. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- j. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- k. Program Pembinaan Lingkungan Sosial
- l. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**Tabel 3.1.**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : <i>"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN"</i>				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Mewujudkan masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlakul karimah dan Berkualitas	Kurangnya pemahaman manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam perlindungan & pengelolaan LH	Rendahnya pelaksanaan konsep pendidikan berbasis lingkungan	Banyaknya Pesantren yang tersebar di wilayah Kabupaten Tasikmalaya Budaya masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang Religius islami
2.	Mewujudkan perekonomian yang tangguh di Bidang Agribisnis dan Pariwisata	Paradigma umum saat ini lebih menempatkan SDA & LH sebagai sumberdaya ekonomis daripada	Dokumen Rencana Perlindungan & Pengelolaan LH (RPPLH) Kabupaten	Potensi Sumber Daya Alam & Keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Kabupaten

Visi : <b>"KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, DINAMIS, DAN BERDAYA SAING DI BIDANG AGRIBISNIS BERBASIS PERDESAAN"</b>				
No.	Misi	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		sumberdaya ekologis	belum tersusun	Tasikmalaya
3.	Mewujudkan tata pemerintahan yang baik ( <i>good governance</i> )	Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pengelolaan LH belum terlaksana secara optimal	Koordinasi antar stakeholder untuk melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap pelestarian LH masih belum optimal	Partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan & pengelolaan LH
4	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah berbasis tata ruang yang berkelanjutan.	Masih banyaknya pemanfaatan ruang yang belum memperhatikan daya dukung & daya tampung lingkungan hidup	Kepentingan stakeholder yang sering besebrangan dengan rencana tata ruang Kabupaten Tasikmalaya	Tersedianya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan LH dan dokumen tata ruang

### 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Propinsi Jawa Barat

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan Tahun 2016 -2021 yaitu "memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional".

Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;
2. Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNB. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor; dan,
3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).

Arah Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 akan di capai adalah sebagai berikut :

1. agenda memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
2. agenda pembangunan meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan
3. agenda mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat yang diharapkan, maka ditetapkan

**Visi**BPLHD Provinsi Jawa Barat, yaitu: **“Menjadi Agen Perubahan Dalam Sikap dan Perilaku Ramah Lingkungan Guna Mencapai Pembangunan Yang Berkelanjutan”**, dengan **Misi** sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
2. Menjaga keselarasan dan keseimbangan pemanfaatan Sumber Daya Alam untuk kesejahteraan rakyat;
3. Mengelola lingkungan berdasarkan perkembangan sains dan teknologi;
4. Meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan dunia usaha dan industri;
5. Membangun kewaspadaan dan partisipasi masyarakat yang responsive;
6. Membangun masyarakat peduli lingkungan (green society);
7. Meningkatkan efektifitas penerapan peraturan lingkungan;
8. Membangun balai kliring lingkungan hidup.

Tujuan BPLHD Provinsi Jawa Barat yang merupakan penjabaran dari Visi yang ada adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM, pengelola lingkungan hidup (Aparat, dunia pendidikan, dunia usaha, LSM, dan masyarakat);
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan;
4. Meningkatkan pengendalian kelestarian keanekaragaman hayati;
5. Meningkatkan pemantauan dan upaya pembinaan/pengendalian pencemaran air, udara, dan limbah B3;
6. Meningkatkan peranan laboratorium penguji kualitas lingkungan yang terakreditasi;
7. Mengamankan upaya pelestarian kawasan lindung;
8. Meningkatkan upaya pengendalian ekosistem pesisir dan laut.

Hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BPLHD Provinsi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten perlu menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi pada Tabel 3.2.

**Tabel 3.2.**

**Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

Tujuan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional				
No.	Sasaran startegis	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6, angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan;	Belum adanya konsep pengelolaan sumberdaya alam & lingkungan hidup terintegrasi	Aspek lingkungan hidup masih belum <i>mainstream</i>	Tersedianya regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
2.	Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH terhadap devisa dan PNBK. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan satwa liar) dan ekspor;	Kurangnya koordinasi antara pemangku kebijakan dalam mewujudkan sinergitas pengelolaan lingkungan	Koordinasi antar stakeholder untuk melahirkan kebijakan yang berpihak terhadap pelestarian LH masih belum optimal	Partisipasi aktif Masyarakat dalam Perlindungan & pengelolaan Lingkungan Hidup
3	Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai penanda (penurunan jumlah hotspots kebakaran hutan dan lahan, peningkatan populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh para pihak, penurunan	Masih lemahnya tatakelola pemerintahan di bidang lingkungan hidup	Kelembagaan lingkungan hidup di Kab. Tasikmalaya masih setingkat kantor	Dukungan SDM dan sarana prasarana pengelolaan lingkungan hidup sudah mulai meningkat dari segi kualitas maupun kuantitas



Tujuan memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional				
No.	Sasaran startegis	Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	konsumsi bahan perisak ozon, dan lain-lain).			

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Wilayah Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya, yang bertujuan mewujudkan Kabupaten yang maju dan sejahtera berbasis sektor pertanian serta menjaga keharmonisan lingkungan berkelanjutan. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi :

- a. Pemantapan lahan sawah beririgasi serta meningkatkan produktivitas pertanian;
- b. Pemantapan pemanfaatan ruang kawasan lindung sesuai dengan fungsinya;
- c. Pengelolaan wilayah pesisir dan laut dengan pendekatan keterpaduan ekosistem, sumberdaya, dan kegiatan pembangunan berkelanjutan;
- d. Pengembangan sistem perkotaan-perdesaan;
- e. Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah;
- f. Pengoptimalan potensi lahan budidaya dan sumberdaya alam yang mendorong pertumbuhan social ekonomi pada wilayah belum berkembang;
- g. Pengembangan kawasan permukiman perkotaan dengan mempertimbangkan keserasian, keseimbangan, dan pembangunan berkelanjutan; dan
- h. Peningkatan fungsi kawasan kepentingan pertahanan dan keamanan.

Wujud dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya terdiri atas : rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah.

- a. Rencana Struktur Ruang Wilayah terdiri atas :
  1. Rencana sistem pusat kegiatan
    - 1.1. Sistem Perkotaan

1.2. Sistem Perdesaan

2. Rencana sistem jaringan prasarana wilayah

2.1. Rencana Sistem Prasarana Utama (rencana system jaringan transportasi darat, laut, perkerataapian)

2.2. Rencana Sistem Prasarana Lainnya (rencana system jaringan prasarana energy, telekomunikasi, sumber daya air dan prasarana lainnya)

Rencana struktur ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- Sebagai arahan pembentuk system pusat kegiatan wilayah kabupaten yang memberikan layanan bagi kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan disekitarnya yang berada dalam wilayah kabupaten.
- Sebagai arahan perletakan sistem jaringan prasarana wilayah yang menunjang dan memberikan layanan bagi fungsi kegiatan terutama pusat-pusat kegiatan/perkotaan.

- b. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kabupaten yang meliputi rencana kawasan lindung dan rencana kawasan budidaya. Rencana kawasan lindung dalam lingkup wilayah kabupaten mencapai 64,12 % dan rencana kawasan budidaya 35,88 % dari total luas wilayah kabupaten.

Rencana pola ruang wilayah kabupaten berfungsi :

- Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan
- Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang
- Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dan RPJP dua puluh tahun
- Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang.

Sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS diamanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Setelah melakukan penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Penghambat dan Pendorong Keberhasilan disajikan dalam table 3.3 sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan telaahan RTRW beserta faktor penghambat dan pendorong**

No	RTRW	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tasikmalaya	Masih terdapatnya penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap RTRW yang telah ditetapkan	Kurangnya sosialisasi dan publikasi dokumen RTRW kepada masyarakat dan pihak yang berkepentingan	RTRW sudah selesai disusun dan dalam proses penetapan menjadi Perda

Dalam penetapan rencana tata ruang wilayah perlu diperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Untuk saat ini, Kabupaten Tasikmalaya belum menyusun kajian lingkungan hidup strategis secara menyeluruh. Inti daripada kajian lingkungan hidup strategis adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah mampu mendukung pengembangan wilayah tersebut seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan, dan sebagainya. Hal ini sangat perlu agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berkelanjutan. Setelah melakukan penelaahan terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tasikmalaya Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, Penghambat dan Pendorong Keberhasilan disajikan dalam table 3.4. sebagai berikut :

**Tabel 3.4.**

**Permasalahan pelayanan SKPD berdasarkan telaahan KLHS beserta faktor penghambat dan pendorong**

No	KLHS	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5R
	Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.	Di dalam KLHS belum diprogramkan untuk pelaksanaan alternative yang berhubungan dengan isu pembangunan berkelanjutan	SKPD belum memahami tentang isu pembangunan berkelanjutan	Adanya rekomendasi untuk mengintegrasikan usulan-usulan kebijakan rencana dan program (KRP) ke dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya

### 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Permasalahan lingkungan di Kabupaten Tasikmalaya seperti pencemaran air, udara dan sampah secara garis besar diakibatkan oleh tekanan penduduk yang cukup tinggi, khususnya terjadinya konversi lahan untuk pemukiman dan masalah-masalah yang diakibatkan kurang memadainya pengaturan industri dalam penanganan limbah cair, gas dan bahan beracun dan berbahaya.

Adapun isu strategis pembangunan Kabupaten Tasikmalaya yang terkait dengan pengelolaan lingkungan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Degradasi lingkungan akibat pencemaran dan eksploitasi sumberdaya alam;
2. Sanitasi dan pengelolaan sampah;
3. Mitigasi dan adaptasi terhadap kejadian bencana alam.